

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 96 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN  
DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN .../...  
(Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)

Provinsi :  
Kota/Kabupaten :  
SKPD :  
Bidang :  
:

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan					Pelaksanaan Kegiatan	Realisasi	Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RCPD	Kodesikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	DAK (Rp juta)	Pendamping (Rp juta)	Jumlah Total Biaya (Rp juta)	Kontrak (Rp juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total									

Kode/Krisi Masalah:

- Kode Masalah
1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
  2. Permasalahan terkait dengan Perunituk Teknis.
  3. Permasalahan terkait dengan Renama Kerja dan Anggaran SKPD.
  4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD.
  5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan.
  6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak.
  7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola.
  8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D.
  9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak.
  10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

Keterangan:

1. Pelaksana DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait yang bertanggung jawab terhadap bidding DAK masing-masing.
  2. Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
  3. Jenis kerjaan sesuai dengan Perunituk Teknis masing-masing bidding DAK.
  4. Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia.
- (\*) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan masing-masing bidding DAK.

**LAPORAN KEMAJUAN PERTIWULAN  
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN ... / ...  
(Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)**

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>PERENCANAAN</b>		
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Penetapan DPA-SKPD		
II	<b>PELAKSANAAN</b>		
5	SK Peretapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11	Penerbitan Surat Perintah Membanding (SPM)		
12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

Keterangan:

Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah.

Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya tuknis oleh Daerah.

Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterapkannya DPA-SKPD.

Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterapkannya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan.

Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender pekerjaan kontrak.

Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola

Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya pekerjaan swakelola.

Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola.

Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal jabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran.

Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterapkannya SPP oleh Pejabat yang diberitikan oleh pengguna anggaran/kas pengguna anggaran.

Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterapkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Urum Daerah berdasarkan SPM.

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

E. E. MANGINDAAN

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN  
 CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN  
 DANA ALOKASI KHUSUS  
 TAHUN ANGGARAN ... / ...  
 (Disi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERENCANAAN		
1	FMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Perunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Fenestapan DFA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		....., ..... 20.....
6	Pelaksanaaan Tender Pekerjaan Kontrak		Sekda Kabupaten / Kota / Provinsi
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		NIP .....
8	Pelaksanaaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaaan Pekerjaan Swakelola		
10	Fenerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP)		
11	Fenerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12	Fenerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

## Keterangan:

Kolom 3 Nomor 1, Disi tanggal diterimanya FMK oleh Daerah.

Kolom 3 Nomor 2, Disi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah .

Kolom 3 Nomor 3, Disi tanggal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Kolom 3 Nomor 4, Disi tanggal diterbitkannya DFA-SKPD.

Kolom 3 Nomor 5, Disi tanggal diterapkannya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan.

Kolom 3 Nomor 6, Disi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender pekerjaan kontrak.

Kolom 3 Nomor 7, Disi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola.

Kolom 3 Nomor 8, Disi tanggal (range) dilaksanakannya pekerjaan kontrak.

Kolom 3 Nomor 9, Disi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola.

Kolom 3 Nomor 10, Disi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran.

Kolom 3 Nomor 11, Disi tanggal diterbitkannya SPM yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN